

IDENTIFIKASI KEGIATAN POLITIK
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI)
PROVINSI SUMATERA BARAT DI ERA REFORMASI

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



Oleh:

DIAN HIKWAN

BP. 00193031

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

ABSTRAK

DIAN IHKWAN (00193031) 2008, Identifikasi Kegiatan Politik Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sumatera Barat Di Era Reformasi. Skripsi, Pembimbing 1: Drs. Bakaruddin RA. M.Si, Pembimbing 2: Drs. Tamrin M.Si, 17 buku referensi, 6 peraturan dan dokumen lainnya, 7 situs internet.

Studi mengenai organisasi pemuda terutama khususnya KNPI adalah sebuah studi yang menarik karena KNPI adalah wadah berkumpul semua potensi-potensi pemuda khususnya potensi politik. KNPI adalah berkumpul pemuda-pemuda yang mempunyai berbagai latar belakang sosial yang melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan amanat organisasi KNPI. Skripsi ini berjudul "identifikasi Kegiatan Politik Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Di Era Reformasi".

Ada beberapa persoalan yang ada tulisan ini. Pertama, Apa saja bentuk kegiatan politik yang dilakukan DPD KNPI Sumbar periode kepengurusan 2004 – 2007. Kedua, Bagaimana DPD KNPI Sumbar periode 2004 – 2007 melaksanakan prinsip keterbukaan dan independensi organisasinya dalam kegiatan-kegiatan politiknya. Untuk menjelaskan persoalan ini secara baik peneliti menggunakan Teori Organisasi yang akan menjelaskan KNPI sebagai sebuah organisasi yang terkait dengan prinsip keterbukaan organisasi, Teori Kelompok Kepentingan yang akan menjelaskan KNPI sebagai sebuah kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan politik dalam rangka partisipasi politik pemuda dan tinjauan umum tentang kegiatan politik yang menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan politik yang KNPI lakukan selama kepengurusan periode 2004 – 2007.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara Pertama, mengumpulkan data wawancara dengan informan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan juga melalui studi dokumentasi. Kedua, analisis data melalui triangulasi sumber data. Terakhir, menghasilkan sebuah karya ilmiah dengan menggunakan acuan teknik penulisan ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi kegiatan, DPD KNPI Sumbar melakukan berbagai kegiatan politik yang meliputi mengajukan usulan kebijakan umum, Mengajukan alternatif kebijakan umum dan mengajukan kritikan dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan pemerintah. kegiatan-kegiatan politik tersebut dilakukan dengan berbagai metode seperti audiensi, mengadakan seminar, melakukan protes dengan penggalangan massa dan melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak. Lebih jauh, didalam hal keterbukaan dan independensi, DPD KNPI Sumbar periode 2004 – 2007 belum mampu menempatkan posisi organisasi sesuai dengan amanat yang ditetapkan didalam AD/ART KNPI sebagai konsekwensi logis belum mandirinya pendanaan organisasi, afiliasi politik kader yang masih dominan serta keberadaan OKP Sayap Partai Politik. Kurang maksimalnya koordinasi pengurus DPD serta banyaknya pengurus yang kurang aktif membuat DPD KNPI Sumbar kurang mampu melaksanakan prinsip keterbukaan organisasi.

Kata Kunci: *Kelompok Kepentingan (KNPI), Kegiatan Politik, Independensi, Organisasi*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Masyarakat merupakan salah satu elemen bangsa yang turut memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan negara Indonesia. Organisasi masyarakat didirikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama berlandaskan kesamaan latar belakang serta harapan kedepan.

"Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945".¹

Salah satu bentuk Organisasi Masyarakat adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP. OKP adalah organisasi yang dibentuk oleh pemuda atas dasar kesamaan pandangan dan kebutuhan pemenuhan kepentingan bersama antara pemuda. Disini OKP tersebut diposisikan sebagai alat dari upaya pemenuhan kebutuhan bersama pemuda tersebut.

Pada era Orde Baru, semua OKP tingkat nasional dihimpun dalam sebuah wadah bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia atau disingkat dengan KNPI. Organisasi yang didirikan pada tanggal 23 Juli 1973 ini bertujuan sebagai wadah perjuangan bersama OKP-OKP dalam rangka pemenuhan tanggungjawab dalam pembangunan nasional sebagai generasi muda pelanjut masa depan bangsa.

¹ UU No. 8 Tahun 1985 Bab I Pasal 1 tentang definisi Organisasi Kemasyarakatan

"KNPI adalah organisasi yang sangat strategis karena di dalamnya terdapat berbagai unsur pemuda yang lintas fraksi, lintas daerah, lintas agama. KNPI bisa dijadikan network untuk melaksanakan berbagai proyek idealisme bangsa".²

UU No. 8 tahun 1985 tentang Referendum sebagai landasan hukum pendirian KNPI dalam pasal 8 menyebutkan: "Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis"³.

Hal ini ditegaskan kembali dalam penjelasan pasal 8 UU No. 8 tahun 1985 yang menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan - satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis - ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, seperti untuk Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam wadah yang sekarang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI),...."⁴

KNPI berperan sebagai media komunikasi antar OKP⁵ dalam mencari rumusan solusi bagi permasalahan-permasalahan sosial politik yang dirasa menuntut peranan KNPI sebagai perwakilan dari keseluruhan suara pemuda.

Didalam Pembukaan Anggaran Dasar (AD) KNPI diterangkan bahwa:

"Bahwasanya untuk melanjutkan dan melaksanakan cita-cita bangsa serta mempersiapkan tunas-tunas bangsa dengan panggilan sejarah dan mewujudkan tanggungjawabnya, maka organisasi kemasyarakatan pemuda dan seluruh potensi pemuda Indonesia berhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia, dengan semangat kebersamaan untuk menumbuhkan, menggerakkan serta menyalurkan dinamika, militansi dan

² <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=129737>, *Kongres KNPI* (diakses pada tanggal 23 Desember 2007, Pukul 15.00 WIB)

³ *Op. Cit.*, UU No. 8 Tahun 1985 Pasal 8.

⁴ *Op. Cit.*, Penjelasan UU No. 8 Tahun 1985 tentang *Referendum*.

⁵ Komunikasi dilakukan oleh dan melalui perwakilan-perwakilan OKP yang duduk dalam kepengurusan KNPI yang keanggotaannya dipilih dalam arena musyawarah atau melalui rapat-rapat formal organisasi seperti rapat pleno diperluas yang melibatkan OKP-OKP dalam memutuskan hal-hal tertentu seperti sikap pemuda, tergantung pada masing-masing tingkatan organisasi.

idealisme pemuda Indonesia demi tercapainya masa depan yang lebih baik".

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan, KNPI adalah wadah berhimpun bagi seluruh OKP untuk beraktifitas dan berkreatifitas dalam kerangka pemenuhan kepentingan bersama. Penekanan kepentingan bersama seperti yang disebutkan diatas dapat diwujudkan salah satunya didalam bentuk Partisipasi Politik. Partisipasi politik ini sesuai dengan tujuan organisasi diatas diupayakan untuk diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan politik KNPI.

Didalam Anggaran Dasar (AD) KNPI disebutkan bahwa KNPI adalah organisasi berhimpun pemuda yang bersifat terbuka dan independen⁶. Dan jika dihubungkan dengan kegiatan politik KNPI, maka kegiatan-kegiatan politik KNPI sebagai bentuk partisipasi politik KNPI seharusnya juga dilandasi atas nilai-nilai keterbukaan dan independensi.

Independensi disini bermakna bahwa KNPI sebagai wadah organisasi pemuda tidak terikat atau mengikatkan diri kepada suatu kekuatan politik manapun. Sedangkan keterbukaan disini bermaksud bahwa KNPI dalam setiap kegiatannya selalu akomodir serta seluruh potensi pemuda yang dalam hal ini semua OKP yang berhimpun didalam KNPI tanpa membeda-bedakan latar belakang ideologi, SARA atau kepentingan politik kelompok pemuda tertentu.

Namun, selama era Orde Baru, KNPI dianggap tidak bisa menempatkan diri sesuai dengan sifat organisasi yang terbuka dan independen sesuai yang diamatkan oleh AD/ART KNPI. Agus Surono didalam tulisannya mengatakan;

⁶ Anggaran Dasar (AD) KNPI Pasal 6 tentang Sifat KNPI

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian diatas, DPD KNPI Sumbar periode 2004 – 2007 telah berupaya untuk memaksimalkan peranan KNPI Sumbar khususnya dalam partisipasi politik KNPI Sumbar. Pertama, kegiatan politik yang dilakukan oleh DPD KNPI Sumbar meliputi mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum yang dilakukan melalui media audiensi dengan pihak-pihak terkait, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dilakukan melalui perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak serta melalui pembentukan opini serta pencarian solusi melalui pelatihan-pelatihan seta seminar-seminar dan yang terakhir adalah mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan pemerintah dengan jalan memobilisasi massa dalam upaya *pressure* atas kebijakan pemerintah.

Kedua, mengenai pelaksanaan prinsip keterbukaan DPD KNPI Sumbar belum mampu menjalankan proses pengorganisasian dengan baik, hal ini dikarenakan beberapa halangan mendasar seperti kurang maksimalnya tingkat keaktifan pengurus sehingga didalam kegiatan politiknya DPD KNPI sering mengandalkan unsur kepengurusan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Disamping itu, mekanisme koordinasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang tidak terstruktur dan dijalankan dengan baik membuat hubungan antara KNPI Sumbar dengan OKP kurang terjalin dengan baik. Hal ini melemahkan fungsi dasar KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda/OKP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU TEORI

- Rosyidi, Bakaruddin, *Kebijakan Publik*. Padang, FISIP-Univ. Andalas, 2003.
- Haryanto, *Sistem Politik Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty, 1982.
- Winardi, J, *Teori Organisasi Dan Pengorganisasian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2003.
- Mas'oed, Mochtar dan Collin Mac Andrew, *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1995.
- Thoha, Miftah, "*Perilaku Organisasi: Konsep Dasar Dan Aplikasinya*". Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2001.
- Rush, Michael dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta, Rajawali Press, 1995.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2006)
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta, Rincka Cipta, 1998.
- Budiono, M.A, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya, Karya Agung, 2006.